

**PERANTI KOHESI DAN KOHERENSI WACANA DALAM RUBRIK POLITIK DAN HUKUM
PADA SURAT KABAR KOMPAS**

Wahyuningsih¹, Rokhmat Basuki², dan Bambang Djunaidi³

¹²³Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
FKIP, Universitas Bengkulu
Ningsih_wahyu64@yahoo.com

Abstrak

Penggunaan peranti kohesi dan koherensi dalam wacana berita rubrik politik dan hukum sangat diperlukan untuk membentuk keterkaitan hubungan antarkalimat maupun paragraf. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan penggunaan peranti kohesi dan kekoherensian wacana pada rubrik politik dan hukum dalam surat kabar Kompas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah wacana berita pada rubrik politik dan hukum dalam surat kabar Kompas edisi Februari 2017 yaitu sebanyak 28 artikel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah. Hasil penelitian ini ditemukan penggunaan peranti kohesi dalam wacana rubrik politik dan hukum yaitu pronomina penunjuk, empunya, penanya, tak tentu; substitusi; elipsis atau pelesapan nomina; konjungsi adversatif, kausal, koordinatif, korelatif, subordinatif, temporal; kohesi leksikal terdiri dari pengulangan. Serta ditemukan penggunaan sarana koherensi yaitu sarana koherensi penambahan; sarana koherensi penekanan; sarana koherensi rentetan; sarana koherensi perbandingan; sarana koherensi pertentangan; sarana koherensi simpulan; sarana koherensi pengulangan.

Kata kunci: *Kohesi, koherensi, wacana rubrik politik dan hukum.*

Abstract

The use of cohesion and coherence devices in the discourse of political and legal news rubrics is necessary to establish interrelationship between paragraphs and paragraphs. This study aims to see and describe the use of cohesion devices and the coherence of discourse there is a political and legal rubric in the newspaper compass. This study used descriptive qualitative method. The source of this research data is the discourse of the news on the rubric of political and legal newspaper compass edition Februari 2017 that is as mch 28 articles. Sampling in this research using purposive sampel technique. Data collection in this research using documentation method. Technique of data analysis in this research done through step by step. The results of this study found the use of cohesion devices in the discourse of political and legal rubric of grammatical cohesion in the form of pronouns or themselves, pronouns pointer, owner, questioner indeterminate; substitution; ellipsis or occultation of nouns; adversative conjunctions, causal, coordinative, correlative, subordinative, temporal; lexical cohesion consists of repetition. Use of means coherencethe means of coherence addition; emphasis; sequence; comparison; opposition; conclusions; repetition.

Keywords : *Cohesion, coherence, political and legal discourse.*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan bahasa manusia dapat menciptakan hubungan sosial yang baik. Dalam hal ini sebagai alat komunikasi, bahasa dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang menggunakan alat komunikasi ini yaitu bidang politik maupun hukum. Oleh karena itu bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan politik dan hukum suatu bangsa. Berita atau kabar suatu keadaan politik dan hukum suatu bangsa biasanya disampaikan dengan berbagai cara melalui media, salah satunya melalui media cetak. Media cetak ini dapat berupa surat kabar ataupun majalah, yang berisi berbagai jenis wacana salah satunya yaitu wacana politik dan hukum.

Dalam rubrik politik dan hukum sudah jelas di dalamnya membicarakan tentang politik dan hukum. Penulis wacana dalam rubrik politik dan hukum ini menuliskan berbagai berita atau informasi-informasi yang menarik dan juga aktual mengenai politik yang sedang menjadi bahan pembicaraan publik saat itu, dan juga proses hukum yang ikut menyertainya. Terkait dengan hal ini, penulis wacana politik dan hukum harus membentuk suatu wacana yang utuh dan padu agar informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembacanya. Untuk memperoleh sebuah wacana yang utuh dan padu maka diperlukan adanya penggunaan peranti kohesi dan kekohersian wacananya.

Aritonang dkk. (2009:3) mengungkapkan bahwa kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu. Sedangkan Sukino (2004:83) menyatakan bahwa peranti kohesi merupakan pemarkah kebahasaan yang difungsikan untuk

menciptakan ikatan antara klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Sedangkan menurut Setiawan (2011:3.6) peranti kohesi merupakan penanda formal yang digunakan sebagai sarana penghubung dalam sebuah teks. Dari beberapa pendapat ahli tentang peranti kohesi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranti kohesi merupakan penanda kebahasaan yang digunakan untuk membentuk keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga terbentuklah wacana yang padu dan utuh. Jadi, penulis menggunakan pendapat Sukino (2004) mengenai definisi peranti kohesi.

Sedangkan koherensi menurut Junaiyah dan Arifin (2010:43) ialah pertalian di antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain sehingga kalimat-kalimat itu membangun kesatuan makna yang utuh. Sebuah paragraf dapat dikatakan koherensi jika ada rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan logis.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa aspek keutuhan wacana terdiri atas kohesi dan koherensi. Dalam sebuah wacana yang baik dan utuh, kalimat-kalimat pendukung yang ada di dalam wacana harus kohesif. Sedangkan wacana yang koheren memiliki susunan bahasa yang teratur dan amanatnya jalin-menjalin dengan rapi. Peranan dan fungsi penanda kohesi secara formal hadir sebagai alat untuk menciptakan keselarasan dan kepaduan informasi sehingga memperlancar dalam pemahaman wacana. Oleh karena itu kalimat yang membentuk wacana pada rubrik politik dan hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut menunjukkan hubungan antarkalimat dan antarparagraf. Hal ini terjadi karena di dalam wacana tersebut satu kalimat atau paragraf dijelaskan dengan kalimat atau paragraf lainnya.

Djasudarma (1994:47) menyatakan bahwa kohesi dan koherensi umumnya berhubungan, tetapi tidak berarti bahwa kohesi harus selalu ada agar wacana menjadi koheren. Mungkin, ada percakapan yang ditinjau dari segi kata-katanya tidak kohesif, tetapi dari segi maknanya koheren (mungkin dari segi pengulangan leksikal seolah-olah kohesif, tetapi dari segi maknanya tidak koheren). Dengan demikian, ada wacana yang tidak kohesif namun koheren, dan ada wacana yang kohesif namun tidak koheren.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, bahwa keterkaitan, keselarasan, dan kepaduan antarkalimat maupun paragraf sangat diperlukan agar memperlancar pemahaman pembaca menangkap informasi. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan peranti kohesi dan kekoherensian wacana. Maka deskripsi mengenai penggunaan peranti kohesi dan koherensi wacana rubrik politik dan hukum ini perlu dilakukan karena sangat besar manfaatnya baik bagi pembaca maupun bagi penulis wacana itu sendiri.

Alasan penulis memilih surat kabar Kompas karena surat kabar tersebut memiliki wilayah publikasi yang luas dan juga berisi berita yang aktual. Surat kabar Kompas merupakan salah satu surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta yang mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Selain itu Kompas tidak hanya merupakan koran dengan sirkulasi terbesar di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Keberadaan koran Kompas ini sangat bermanfaat, karena koran Kompas ini berisi berita nasional dan internasional, berita bisnis dan keuangan, dan berita olahraga. Jadi, alasan penulis tertarik meneliti kohesi dan koherensi dalam surat kabar Kompas yaitu bahwa dalam sebuah surat kabar yang bertaraf nasional harus mengutamakan kejelasan informasi.

Dengan adanya penggunaan peranti kohesi dan koherensi maka akan membawa pengaruh dan kejelasan satuan bentuk kebahasaan yang satu dengan yang lainnya sehingga ide dalam wacana dapat lebih terarah secara jelas dan utuh. Maka makna penggunaan peranti kohesi dan koherensi dalam wacana atau teks yaitu untuk membentuk keselarasan dan kepaduan informasi yang akan mempermudah pemahaman informasi yang terdapat pada surat kabar harian Kompas ini khususnya pada rubrik politik dan hukum. Namun hal ini tidak terlepas dari peran konteks dalam peranti kohesi dan koherensi yang akan memudahkan pengidentifikasian dan penganalisisan bentuk peranti kohesi dan juga kekoherensian wacana oleh penulis.

Penulis tertarik untuk meneliti rubrik politik dan hukum edisi february 2017 dalam Surat Kabar Kompas karena gaya bahasa yang digunakan dalam rubrik politik dan hukum ini yang terkesan formal, santun, dengan lay out yang sederhana, judul yang tidak bombastis dan mengupas berita secara tajam namun tidak menggunakan bahasa yang kurang sopan. Dengan bahasa yang formal tersebut Kompas dapat menambah kosa kata pembaca dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembaca untuk berbahasa yang sopan, baik dan juga terpelajar. Selain itu, permasalahan yang dimuat dalam wacana tersebut merupakan permasalahan yang masih terbaru dan dibicarakan di publik pada saat itu yaitu mengenai pemilihan umum. Rubrik ini membahas dan juga mengupas informasi dengan jelas tentang berbagai politik yang digunakan oleh para politikus dan juga hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, keutuhan dan kepaduan wacana pada rubrik politik dan hukum harus diperhatikan agar pembaca dapat memahami dengan mudah informasi yang terdapat dalam wacana.

Dalam rangka inilah, kohesi dan kekoherensian sebuah wacana perlu diteliti

agar pembaca dapat memahami informasi dengan mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis harus memiliki pengetahuan tentang penggunaan peranti kohesi dan koherensi yang baik. Keberkaitan itu harus mencakup dua macam hal, yakni bentuk maupun isinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan peranti kohesi pada wacana rubrik politik dan hukum dalam Surat Kabar Kompas.
2. Kekohersian wacana pada rubrik politik dan hukum dalam Surat Kabar Kompas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sanjaya (2014:47) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Dalam penelitian deskriptif penulis mencatat dan menganalisis dengan teliti dan cermat data yang berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, dan wacana berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian, sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka yang akan dideskripsikan adalah penggunaan kohesi dan koherensi pada rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas edisi february 2017.

Emzir (2014:64) menyatakan bahwa istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang diteliti. Data dapat berupa apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian,

fotografi, dokumen resmi, dan artikel surat kabar. Berdasarkan penjelasan tersebut, jadi data penelitian ini ialah berupa artikel surat kabar Kompas edisi Februari 2017.

Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana berita pada rubrik politik dan hukum dalam Surat Kabar Harian Kompas yang penulisannya menerapkan sarana kohesi dan koherensi. Objek penelitian ini adalah penggunaan peranti kohesi dan koherensi wacana pada rubrik Politik dan Hukum dalam Surat Kabar Harian Kompas. Populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan wacana yang mengandung peranti kohesi dan sarana koherensi yang terdapat dalam wacana rubrik Politik dan Hukum surat kabar harian Kompas yang terbit pada bulan february 2017 yaitu sebanyak 216 artikel. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan sampel bertujuan (sampling purposif). Sugiyono (2013:218-219) menyatakan bahwa sampel bertujuan adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri spesifik atau tujuan dan maksud tertentu. Artinya, hanya wacana yang mengandung peranti kohesi dan koherensi yang bervariasi yang diambil sebagai sampel penelitian. Jadi, sampel yang diambil yaitu sebanyak 28 artikel atau 13% dari populasi.

Teknik data dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi. Jadi, teknik dilakukan dengan cara mengumpulkan wacana rubrik politik dan hukum dalam surat kabar Kompas. selanjutnya setelah pengumpulan data dilakukan penomoran data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini.

- a. Mengumpulkan data berupa surat kabar Kompas yang berjumlah 28 surat kabar edisi february 2017 dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Kemudian penulis mengambil artikel dalam rubrik politik

dan hukum dengan jumlah 28 artikel, karena artikel yang terkumpul hanya 28 artikel yang mengandung peranti kohesi dan koherensi yang bervariasi. 28 artikel tersebut akan mewakili artikel yang akan dianalisis oleh penulis.

- b. Pengkodean data setelah data terkumpul. Penulis memberi kode disetiap paragraf yang terdapat pada artikel rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas. Pengkodean dilakukan dengan cara memberi nomor untuk setiap paragraf-paragraf dalam artikel, hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data.
- c. Mengidentifikasi data yang mengandung penggunaan peranti kohesi dan koherensi pada artikel rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.
- d. Mengklasifikasi data yang mengandung penggunaan peranti kohesi dan koherensi pada artikel rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.
- e. Menganalisis data yang mengandung penggunaan peranti kohesi dan koherensi dengan menggunakan metode bagi unsur langsung pada artikel dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.
- f. Menyimpulkan hasil analisis yang mengandung penggunaan peranti kohesi dan kekoherensian pada artikel dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa penggunaan peranti kohesi dan koherensi dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas. Dalam rubrik politik dan hukum ditemukan adanya penggunaan berbagai peranti kohesi dan koherensi. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, peranti kohesi yang terdapat dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu (1) pronomina orang pertama tunggal yaitu *saya* dan *aku*, (2)

pronomina orang pertama jamak yaitu *kami* dan *kita*, (3) pronomina orang kedua tunggal yaitu *kamu*, *anda*, *kau* dan *engkau*, (4) pronomina orang ketiga tunggal yaitu *dia* dan *ia*, (5) pronomina orang ketiga jamak yaitu *mereka*, (6) pronomina penunjuk yaitu *itu*, *ini*, dan *tersebut*, (7) pronomina empunya yaitu *nya*, *ku*, dan *mu*, (8) pronomina penanya yaitu *apa*, *siapa*, *bagaimana* dan *dimana*, (9) pronomina tak tentu yaitu *para* dan *masing-masing*, *seseorang*, dan *sesuatu*. (10) Substitusi (penggantian) yaitu *begitu*, *dengan demikian*, *hal senada*, *hal tersebut*, *hal ini*, *kendati demikian*, *demikian*, *demikian rupa*, *pada saat yang sama*, dan *di lokasi yang sama*. (11) Elipsis atau pelesapan yaitu *mereka*. (12) Konjungsi terdiri dari konjungsi adversatif yaitu *tetapi* dan *namun*, konjungsi kausal *karena* dan *sebab*, konjungsi koordinatif yaitu *dan* dan *atau*, konjungsi korelatif yaitu *baik/maupun*, konjungsi subordinatif yaitu *meskipun*, *meski*, *meski demikian*, *kalau*, dan *bahwa*, konjungsi temporal yaitu *sebelum* (13) Kohesi leksikal terdiri dari pengulangan (repetisi) yaitu kata *mengajarkan*, *KPK* dan *hantu-hantu*. Penggunaan pronomina ini mulai dari pronomina orang pertama tunggal hingga pronomina orang ketiga jamak. Dalam wacana rubrik politik dan hukum pronomina digunakan untuk menggantikan diri dalam rubrik politik dan hukum. Data dapat dilihat pada tabel data di bawah ini.

Selain itu, juga terdapat tujuh sarana koherensi dalam rubrik politik dan hukum yaitu (1) Sarana koherensi penambahan yaitu *juga*, *pula*, dan *menambahkan*. (2) Sarana koherensi penekanan yaitu *bahkan* dan *sekali lagi*. (3) Sarana koherensi rentetan yaitu *pertama*, *kedua*, *ketiga* dan *selanjutnya*. (4) Sarana koherensi perbandingan yaitu *sedangkan*. (5) Sarana koherensi pertentangan atau kontras yaitu *tetapi*, *padahal* dan *sebaliknya*. (6) Sarana koherensi simpulan

atau hasil yaitu *jadi*. (7) Sarana koherensi pengulangan yaitu kata *mengajarkan*, *KPK* dan *hantu-hantu*. Dengan jumlah penggunaan yang berbeda-beda, sehingga peranti yang digunakan ada yang sedikit dan ada pula yang sering digunakan. Berikut ini pembahasan temuan penggunaan peranti kohesi dan sarana koherensi dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.

1. Peranti Kohesi

a. Pronomina atau Kata Ganti

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada surat kabar Kompas ditemukan adanya penggunaan peranti kohesi yaitu pronomina yang terdiri dari kata ganti diri, kata ganti penunjuk, kata ganti empunya, kata ganti penanya, dan kata ganti tak tentu. Penggunaan kata ganti diri yang ditemukan dalam surat kabar Kompas rubrik politik dan hukum yaitu kata ganti orang pertama tunggal *saya*, *aku*; kata ganti orang kedua tunggal yaitu *anda*, *kau*, *engkau*; kata ganti orang ketiga tunggal yaitu *dia*, *ia*, *beliau*; kata ganti orang ketiga jamak yaitu *mereka*. Selain itu ditemukan pula penggunaan kata ganti penunjuk yaitu *ini*, *itu*, *tersebut*. Ditemukan pula penggunaan kata ganti empunya yaitu *ku*, *mu*, *nya*. Penggunaan kata ganti penanya yang ditemukan dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu *siapa*, *apa*, *bagaimana*, *di mana*. Dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas juga ditemukan penggunaan kata ganti tak tentu yaitu *para*, *masing-masing*, *seseorang*, dan *sesuatu*. Penggunaan kata ganti digunakan untuk menegaskan bahwa topik yang sedang dibahas masih sama. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk meletakkan tingkat fokus yang lebih tinggi pada topik yang dimaksud.

Apabila topik yang dibicarakan orang maka yang digunakan yaitu pronomina atau kata ganti orang, dan apabila topiknya bukan orang maka pronominalisasi dapat diwujudkan dengan kata ganti penunjuk. Sedangkan, jika topiknya membicarakan kepemilikan maka pronominalisasi diwujudkan dengan kata ganti empunya. Ditemukan sebanyak 366 kali penggunaan pronomina. Contoh dapat dilihat berikut ini.

(1) Ma'ruf memberikan keterangan selama tujuh jam. (2) **ia** diminta menjelaskan seputar mekanisme terbitnya pendapat dan sikap keagamaan dari lembaga yang dipimpinnya. (3) Perbedaan fatwa dan pendapat keagamaan juga disinggung dalam agenda pemeriksaan saksi kali **ini**.

Pada wacana di atas dapat dilihat adanya penggunaan kata ganti orang yaitu *ia*, kata ganti empunya yaitu *nya* dan kata ganti penunjuk yaitu *ini*. Kata ganti *ia* digunakan untuk menggantikan Ma'ruf yang telah disebutkan pada kalimat (1). Penggunaan kata ganti *ia* menunjuk pada Ma'ruf yang telah memberikan keterangan selama tujuh jam, salah satunya menjelaskan mekanisme terbitnya pendapat dan sikap keagamaan dari lembaganya. Selain itu penggunaan kata ganti *nya* pada wacana di atas mengacu pada lembaga yang dipimpin oleh Ma'ruf, jadi penggunaan kata ganti tersebut menunjukkan kepemilikan. Penggunaan kata ganti penunjuk *ini* juga terdapat pada wacana di atas. Kata ganti *ini* menunjuk pada pemeriksaan Ma'ruf sebagai saksi yang dimintai keterangan terkait dengan terbitnya pendapat dan sikap keagamaan dari lembaga yang dipimpinnya.

b. Substitusi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada surat kabar Kompas, ditemukan adanya penggunaan peranti kohesi substitusi atau penggantian. Penggantian yang ditemukan dalam wacana rubrik politik dan hukum yaitu berupa penggunaan kata *begitu, dengan demikian, hal senada, hal tersebut, hal ini, kendati demikian, demikian, demikian rupa, pada saat yang sama, di lokasi yang sama*. Penggantian tersebut digunakan untuk menggantikan satuan lingual tertentu (yang telah disebut) dengan satuan lingual lain dalam sebuah wacana guna memperoleh pembeda. Misalnya penggunaan kata *begitu* yang menggantikan satuan lingual tertentu yang berupa klausa atau kalimat, begitu pula seperti penggunaan kata *dengan demikian, hal senada, hal tersebut, hal ini, kendati demikian, demikian, demikian rupa*. Contoh dapat dilihat berikut ini.

(1) Ma'ruf menjelaskan, pendapat keagamaan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada penegak hukum kecuali dilanjutkan menjadi undang-undang. (2) **Hal ini** pernah terjadi saat diterbitkannya UU Pornografi. (3) Regulasi itu di bahas dan disahkan setelah adanya fatwa dan pendapat keagamaan dari MUI.

Pada wacana di atas terdapat adanya penggantian dengan satuan lingual yaitu *hal ini*. *Hal ini* pada kalimat (2) menggantikan "pendapat keagamaan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada penegak hukum kecuali dilanjutkan menjadi undang-undang" yang terdapat pada kalimat (1). Penggantian tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan yang akan membingungkan pembaca, dan juga untuk memperoleh pembeda. Pada

wacana rubrik politik dan hukum ditemukan adanya penggunaan substitusi sebanyak 18 kali dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.

c. Elipsis atau Pelesapan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan penggunaan peranti kohesi yaitu elipsis atau pelesapan. Elipsis atau pelesapan merupakan penghilangan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas ditemukan satu kali penggunaan elipsis. Pelesapan yang ditemukan dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu pelesapan nomina. Elipsis nomina yaitu penghilangan atau pelesapan pada unsur nomina atau frasa nominal kata benda. Contoh dapat dilihat berikut ini.

Sejara setelah terpilih dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan, *mereka* harus langsung bekerja dan tidak memiliki waktu untuk beradaptasi atau belajar lagi.

Pada kalimat di atas, terdapat penghilangan atau pelesapan nomina yaitu *mereka*. Pelesapannya hanya terjadi satu kali yaitu pada klausa terakhir. Kata ganti *mereka* pada klausa tersebut berkedudukan sebagai subjek. Jadi kalimat di atas dapat direpresentasikan lagi sebagai berikut.

- 1) Segera setelah terpilih dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan, *mereka* harus langsung bekerja dan \emptyset tidak memiliki waktu untuk beradaptasi atau belajar lagi.
- 2) Segera setelah terpilih dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan, *mereka* harus langsung bekerja dan *mereka* tidak memiliki waktu untuk beradaptasi atau belajar lagi.

d. Konjungsi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas ditemukan adanya berbagai penggunaan konjungsi, yaitu konjungsi adversatif yang meliputi kata *tetapi*, *namun*; konjungsi kausal yaitu *sebab*, *karena*; konjungsi koordinatif yaitu *dan*, *atau*; konjungsi korelatif yaitu *baik/maupun*; konjungsi subordinatif yaitu *meskipun*, *meski*, *meski demikian*, *kalau*, *bahwa*; konjungsi temporal yaitu *sebelum*. Penggunaan konjungsi dimaksudkan untuk menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana yang dapat berupa frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Misalnya kata hubung *tetapi* atau *namun* digunakan untuk menghubungkan dua unsur atau lebih yang berisi hal yang bertentangan. Kemudian kata *sebab* atau *karena* digunakan untuk menghubungkan dua unsur atau lebih yang menunjukkan sebab – akibat. Sedangkan penggunaan kata hubung *dan* dan *atau* digunakan untuk menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya, atau memiliki status yang sama. Kata hubung *baik/maupun* digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama, konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata. Contoh dapat dilihat berikut ini.

(1) “Posisi PPP saat ini adalah sistem proporsional terbuka. (2) **Namun**, kalau ada pergeseran konstelasi sikap mayoritas di pansus, tentu PPP juga harus menyesuaikan. (3) Oleh karenanya, dari sekarang kami mengkaji, kalau tertutup dampaknya ke PPP kira-kira seperti apa,” ujarnya.

Pada wacana di atas terdapat salah satu contoh penggunaan konjungsi adversatif yaitu *namun*. Kata hubung *namun* menghubungkan kalimat (1) dengan kalimat (2). Penggunaan kata hubung *namun* menandakan bahwa kedua kalimat pada wacana di atas berisikan pertentangan. Kalimat pertama berisi penyatuan yaitu “Posisi PPP saat ini adalah sistem proporsional terbuka” dan kalimat kedua berisi pernyataan yang kontras yang bertentangan dengan kalimat kedua yaitu “kalau ada pergeseran konstelasi sikap mayoritas di pansus, tentu PPP juga harus menyesuaikan”. Dalam wacana rubrik politik dan hukum jumlah keseluruhan penggunaan konjungsi yaitu sebanyak 123 kali.

e. Kohesi Leksikal

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada surat kabar Kompas ditemukan penggunaan kohesi leksikal yaitu repetisi. Repetisi merupakan pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberikan penekanan. Misalnya pengulangan pada kata *KPK* pada wacana berikut ini.

(1) Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat *KPK* Febri Diansyah berharap tidak ada lagi korupsi di MK, terutama terkait sengketa hasil pilkada. (2) *KPK* akan membantu mengawal dan menjaga kredibilitas lembaga tersebut. (3) *KPK* juga mengimbau agar pihak-pihak yang bersengketa berperkara secara profesional dengan tidak memberi apa pun kepada hakim atau pegawai MK.

Pengulangan kata *KPK* pada kalimat (2) dan (3) di atas termasuk pada ke dalam pengulangan penuh/utuh. Pengulangan tersebut dimaksudkan untuk menekankan pada

topik pembicaraan yaitu mengenai tindakan yang diambil KPK dalam menyikapi kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi. Dalam wacana rubrik politik dan hukum ini ditemukan sebanyak tiga kali penggunaan kohesi leksikal repetisi.

2. Koherensi

a. Sarana Penambahan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi yaitu penambahan. Sarana penambahan yang digunakan dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu *juga, pula, menambahkan*. Penggunaan sarana penambahan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kalimat atau klausa tersebut merupakan wujud penambahan informasi dari klausa atau kalimat sebelumnya. Misalnya penggunaan kata *juga* pada wacana berikut ini.

“Saya tidak setuju (Pembubaran KASN). KASN ini motor dari reformasi birokrasi. KASN *juga* motor dari revolusi mental,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan.

Penggunaan kata *juga* tersebut menunjukkan bahwa kalimat (3) berisi penambahan informasi dari kalimat sebelumnya yaitu bahwa KASN selain sebagai motor reformasi birokrasi juga sebagai motor revolusi mental. Dalam wacana rubrik politik dan hukum ditemukan sebanyak 65 kali penggunaan sarana penambahan ini.

b. Sarana Penekanan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi yaitu penekanan. Sarana penekanan digunakan untuk menguatkan pendapat atau opini yang terhadap topik yang sedang dibicarakan. Sarana

penekanan yang ditemukan pada wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu berupa penggunaan kata *bahkan* dan *sekali lagi*. Sesuai pentas, Presiden menjabat tangan Sujiwo.

Apa komentar Jokowi? “Beliau tak apa-apa kok. Tampaknya beliau gembira. Tapi tak tahu di hatinya,” kata Sujiwo. **Sekali lagi** ini hanya cuplikan puisi spontan Sujiwo. Dengarkan lengkapnya di tempat sang dalang.

Dapat dilihat pada wacana di atas unsur lingual kata *sekali lagi* digunakan untuk menekankan bahwa yang telah disebutkan merupakan cuplikan dari puisi Sujiwo. Penggunaan sarana penekanan dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas ini bertujuan untuk menekankan informasi, sehingga lebih memperkuat pendapat ataupun informasi yang ada di dalam kalimat atau klausa sebelumnya. Ditemukan sebanyak 14 kali penggunaan sarana penekanan tersebut.

c. Sarana Rentetan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi yaitu rentetan. Sarana rentetan yang ditemukan dalam rubrik politik dan hukum ini yaitu *pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya*. Berikut ini contoh penggunaan sarana rentetan *pertama, kedua*.

Secara terpisah, Sekretaris jenderal FUI Muhammad Al Khatthath mengatakan, pemindahan lokasi aksi dari sebelumnya di Lapangan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia ke Masjid Istiqlal disebabkan dua hal. **Pertama**, untuk menghindari benturan dengan kampanye pamungkas dua pasangan calon gubernur DKI Jakarta. **Kedua**, untuk

mencegah provokasi yang akan memanfaatkan kehadiran massa.

Penggunaan sarana rentetan ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya karena kalimat pertama dan selanjutnya saling berkelanjutan atau berkaitan satu sama lain. Dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas, ditemukan jumlah penggunaan sarana rentetan yaitu sebanyak lima kali.

d. Sarana Perbandingan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi yaitu perbandingan, yang ditunjukkan dengan ditemukannya penggunaan kata *sedangkan*. Penggunaan kata *sedangkan* dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu untuk menghubungkan dua klausa atau kalimat yang berbeda, sehingga terjadilah perbandingan. Sehingga terbentuklah keterkaitan antara kalimat atau klausa yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini contoh penggunaan sarana perbandingan.

Honorer K-1 adalah honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), **sedangkan** K-2 tidak dibiayai APBN atau APBD.

Pada kalimat di atas kata *sedangkan* digunakan untuk menunjukan perbandingan antara Honorer K-1 yang dibiayai APBN/APBD dengan K-2 yang tidak dibiayai APBN maupun APBD. Penggunaan sarana perbandingan ditemukan sebanyak dua kali.

e. Sarana Pertentangan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi pertentangan yaitu *tetapi, sebaliknya,*

padahal. Penggunaan sarana pertentangan ini untuk menghubungkan antara kalimat atau klausa untuk menyatakan hal yang bertentangan atau kontras. Sehingga antara kalimat yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Berikut ini contoh penggunaan sarana pertentangan.

(1) Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengatakan, ketidaktahuan golongan mayoritas Indonesia terhadap pengaruh dan kontribusi Tionghoa menyebabkan hadirnya kebencian. (2) **Padahal**, mulai dari mauknya Islam di Nusantara, pembentukan kebudayaan batik, hingga perumusan Pancasila terkait erat dengan pengaruh Tionghoa.

Penggunaan sarana pertentangan *padahal* pada wacana di atas menunjukkan bahwa antara kalimat (1) dan (2) berisi hal yang bertentangan yaitu kebencian golongan mayoritas Indonesia terhadap orang-orang Tionghoa yang disebabkan ketidaktahuan pengaruh Tionghoa terhadap sejarah dan budaya Indonesia. Pada wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas ditemukan penggunaan sarana pertentangan sebanyak 15 kali dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas.

f. Sarana Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi kesimpulan yaitu *jadi*. Penggunaan kata *jadi* dimaksudkan untuk menunjukkan pada kesimpulan akhir dari topik pembicaraan dalam wacana. Berikut ini contoh penggunaan sarana kesimpulan.

“Benar. Memang ada surat disposisi **tersebut**. **Saya** perintahkan Ajun Komisaris Besar Sugiarto dan Ajun Komisaris Besar Brotoseno bekerja sama dengan kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar dapat melanjutkan pemeriksaan. **Jadi**, disposisi **saya** berbunyi diperiksa di Jawa Timur,” kata Cahyono.

Penggunaan sarana kesimpulan *jadi* pada wacana di atas menunjukkan bahwa kalimat terakhir tersebut merupakan kesimpulan akhir dalam pembicaraan tersebut. Dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas ditemukan adanya penggunaan sarana kesimpulan dalam wacana rubrik politik dan hukum yaitu sebanyak tiga kali.

g. Sarana Pengulangan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya penggunaan sarana koherensi pengulangan. Misalnya pengulangan pada kata *KPK*, *hantu-hantu*, *mengajarkan*. Ditemukan penggunaan sarana pengulangan sebanyak tiga kali yang dimaksudkan untuk mempertahankan hubungan konsesif antar kalimat. Hal ini dapat dilihat pada contoh penggunaan sarana pengulangan dalam wacana berikut ini.

Kengerian yang ditimbulkan bom atom di Hiroshima *mengajarkan* banyak hal. Bencana dan kerusakan yang ditimbulkannya seharusnya *mengajarkan* kepada manusia, tak seharusnya da lagi perang dunia.

Pada wacana di atas terdapat sarana koherensi pengulangan yaitu pada kata *mengajarkan*. Pengulangan kata *mengajarkan* pada wacana di atas dimaksudkan untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa dan keindahan bahasa. Selain itu penggunaan repetisi ini dimaksudkan untuk mempertahankan hubungan konsesif antarkalimat, dan juga sebagai penanda

bahwa topik pembicaraan pada wacana tersebut tentang pengajaran yang dapat diambil dari hal yang terjadi. Oleh karena itu sengan adanya penggunaan sarana koherensi ini maka hubungan antara kalimat satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu sama lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan peranti kohesi dan koherensi dalam wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas, dapat disimpulkan adanyapenggunaan peranti kohesi pada rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas sebagaiberikut.

1. Penggunaan peranti kohesi gramatikal dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu (1) Pronomina orang pertama tunggal yaitu *saya*, dan *aku*, (2) pronomina orang pertama jamak yaitu *kami* dan *kita*, (3) pronomina orang kedua tunggal *kamu*, *kau*, dan *engkau*, (4) pronomina orang ketiga tunggal yaitu *dia* dan *beliau*, (5) pronomina orang ketiga jamak yaitu *mereka*, (6) pronomina penunjuk yaitu *ini*, *itu*, dan *tersebut*, (7) pronomina empunya yaitu *mu*, *ku*, dan *nya*, (8) pronomina penanya yaitu *apa*, *siapa*, *bagaimana* dan *di mana*, (9) pronomina tak tentu yaitu *para*, *masing-masing*, *seseorang*, dan *sesuatu*. (10) Peranti substitusi yaitu *begitu*, *dengan demikian*, *hal senada*, *hal tersebut*, *hal ini*, *kendati demikian*, *demikian*, *demikian rupa*, *pada saat yang sama*, dan *di lokasi yang sama*. (11) Peranti Elipsis yaitu *mereka*. (12) Konjungsi adversatif yaitu: *tetapi*, *namun*. (13) Konjungsi kausal yaitu *sebab*, *karena*. (14) Konjungsi koordinatif yaitu *dan*, *atau*. (15) Konjungsi korelatif yaitu *baik/maupun*. (16) Konjungsi subordinatif yaitu *meskipun*, *meski*, *meski demikian*, *kalau*, dan *bahwa*. (17)

Konjungsi temporal yaitu *sebelum*. Penggunaan peranti kohesi leksikal dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas berupa pengulangan yaitu repetisi penuh atau utuh pada kata *hantu-hantu*, *KPK*, *mengajarkan*.

2. Penggunaan sarana koherensi dalam rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas yaitu: (1) Sarana koherensi penambahan yaitu *juga*, *pula*, *menambahkan*. (2) Sarana koherensi penekanan yaitu *bahkan*, *sekali lagi*. (3) Sarana koherensi rentetan yaitu *pertama*, *kedua*, *ketiga*, *selanjutnya*. (4) Sarana koherensi perbandingan yaitu *sedangkan*. (5) Sarana koherensi pertentangan yaitu *tetapi*, *sebaliknya*, *padahal*. (6) Sarana koherensi kesimpulan atau hasil yaitu *jadi*. (7) Sarana koherensi pengulangan yaitu pengulangan satuan lingual yaitu *hantu-hantu*, *KPK*, *mengajarkan*.

Saran

1. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan masih memerlukan tingkat lanjutan. Sehingga masih banyak kekeurangan yang memerlukan tindak lanjut. Oleh karena itu diharapkan muncul penulis lain yang yang mengembangkan penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya meneliti data yang berupa wacana rubrik politik dan hukum surat kabar Kompas. Saran penulis untuk calonpenulis yang lain adalah untuk meneliti wacana pada

rubric lain seperti rubrik ekonomi, opini, sehingga dapat terlihat dengan jelas perbedaan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam wacana jenis tersebut, dan juga variasi penggunaan jenis kohesi dan koherensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Buha dkk. 2009. *Kohesi Leksikal dalam Editorial Surat Kabar Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djajasudarma, Fatimah. 1994. *Wacana Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: Eresco.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaiyah dan E. Zaenal Arifin. 2010. *Keutuhan Wacana*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sanjaya, Wina. 2014. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Teguh. 2011. *Wacana Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukino. 2004. *Memahami Wacana Bahasa Indonesia*. Bengkulu: Perpustakaan UNIB.